



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 33/1995683

☐ Pembetulan Ke

☐ Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP	:	1219030102750002	A.5 NAMA JABATAN	:	Pengawas Mapel/ Rumpun Mapel dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pd SLTP, MTs, Sekolah Menengah, MA, dan yang sederajat gol IV
A.2 NIP/ NRP	:	197502012005011005	A.6 JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
A.3 NAMA	:	Mangalam Sinaga	A.7 NIK	:	1219030102750002
A.4 PANGKAT/ GOL	:	IV/a / Pembina	A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP		<div>K/3</div>

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	62.763.400
2.	TUNJANGAN ISTRI	6.276.340
3.	TUNJANGAN ANAK	2.510.536
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	10.150.000
6.	TUNJANGAN BERAS	4.055.520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	643
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	9.798.600
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	95.555.039
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	4.777.751
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.913.113
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	7.690.864
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	87.864.175
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	87.864.175
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	15.864.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	793.199
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	793.199
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	793.199
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	793.199
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	0001459718121000
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN
D.3 ID Sub Unit Organisasi	:	299013
D.4 Tanggal	:	3 1 <small>dd</small> 1 2 <small>mm</small> 2 0 2 5 <small>yyyy</small>
D.5 NAMA PENANDATANGAN	:	ZAINUL IHSAN NASUTION, SE
D.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

